RENCANA KERJA
(RENJA)

2023

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan suatu dokumen perencanaan program tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan di Kota Batam.

Rencana Kerja ini menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan. Tugas membangun sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2023 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, Juli 2022

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Batam

Mardanis. S.E. M.H
NIP. 19680714 198011 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 52
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 64
3.3 Program dan Kegiatan 66
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 72
BAB. V PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranjgkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 11

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 33

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 43

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota batam.....51

Tabel 3.1. Indentifikasi Kebijakan Nasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 53

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Program Urusan Pangan dan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau 60

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 65

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 67

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam untuk periode Tahun Anggaran 2023, merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan Dinas, yang memuat himpunan aspirasi *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi yang disandingkan dengan perencanaan *Top Down*, baik dari Kunjungan Kerja Walikota, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Program Perangkat Daerah itu sendiri.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah dokumen perencanaan daerah yang memiliki periode 1 (satu) tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Tahun Anggaran 2023 yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan Daerah, terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan yaitu Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel

Untuk sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

1. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan
2. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman

Sebagai sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Perencanaan Jangka Menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Renja). Substansi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian. Rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun Anggaran Kedua dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 atau sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021 - 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023, merupakan acuan dalam Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam secara prioritas.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam menyelenggarakan fungsi Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan, ,;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan,
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayan Minimal;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

m. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota;

n. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

o. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2041;

p. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;

q. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam;

r. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam selama 1 (satu) tahun 2023 yang mencakup rencana capai kinerja (target) pada tahun tersebut untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, antara lain:

1. Merumuskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan secara realistis, konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan rencana jangka pendek
2. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian target indikator program dan kegiatan serta perencanaan penganggaran OPD yang mendukung Misi Walikota Batam lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

5.1. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2021) dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah mencapai target dan belum mencapai target dari indikator yang telah di tetapkan.

A. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan indikator yang mencapai target.

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

2. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

3. **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

4. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Sub Kegiatan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

   Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

   Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

   Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

   Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

   Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

7. **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

   Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

   Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

B. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan indikator yang tidak mencapai target.

Tidak ada Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target yang indikator yang telah di tetapkan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2023. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program, kegiatan dan sub yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan tahun berjalan. Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target, telah mencapai target dan yang melampaui target sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi anggaran. Selanjutnya, secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranjgkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Batam

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					UR USAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan								
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	40 Orang		40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis Barang		4 Jenis Barang	4 Jenis Barang	100%	4 Jenis Barang	8 Jenis Barang	200
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis		30 Jenis	30 Jenis	100%	30 Jenis	60 Jenis	200

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 Unit	200
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis		9 Jenis	9 Jenis	100%	8 Jenis	17 Jenis	212.5
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Media		2 Media	2 Media	100%	2 Media	2 Media	100
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Kali		44 Kali	44 Kali	100%	44 Kali	88 Kali	200
2	09	01	2.07		Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6 jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	6 jenis	3 Jenis	50
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	100	100%	100	100	100
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali		12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33 Orang		33 Orang	33 Orang	100%	33 Orang	33 Orang	100
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit		3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Jenis Alat		4 Jenis Alat	4 Jenis Alat	100%	4 Jenis Alat	8 Jenis Alat	200

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Gedung		2 Gedung	2 Gedung	100%	2 Gedung	2 Gedung	100
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)**	2610		2605	2605	100%	2606	2605	99.0
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)**	**153**		**152**	**152**	100%	**152.2**	**152**	99.48
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Informasi harga pangan dan NBM	1 dokumen (ketersediaan pangan 2400kkal/kapita/hari)		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen (ketersediaan pangan 2400kkal/kapita/hari)	1 dokumen	100
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait 2. Jumlah peserta sosialisasi;	1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait =24 kali 2. Jumlah peserta sosialisasi= 50 orang		1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait =14 kali ; 2. Jumlah peserta sosialisasi=0	1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait =14 kali ; 2. Jumlah peserta sosialisasi=0	100%	1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait =15 kali2. Jumlah peserta sosialisasi=25 orang	1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait =14 kali ; 2. Jumlah peserta sosialisasi=0	100
2	**09**	**03**	**2.02**		**Penglolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)**	50		0	0	100%	25	25	50

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Pemda	50 ton		0	0	100%	12 ton	12 Ton	24
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)**	**12 kecamatan**		**12 kecamatan**	**12 kecamatan**	100%	**12 kecamatan**	**12 kecamatan**	100
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Jumlah peserta yang mengikuti LCM B2SA dan Demo Masak B2SA;	12 Kec		12 Kec	12 Kec	100%	12 Kec	12 Kec	100
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	70.31		belum ada	belum ada	100%	54.7	54.7	77.80
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun**	100		100	100	100%	100	100	100
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	100
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	3.13		12.5	12.5	100%	9.38	12.5	25

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi kerawanan pangan yang dilaksanakan	16 kali					0		
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani (kelurahan)	11 Kel		4 Kel	4 Kel	100%	4 Kel	8Kel	72.73
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)**	90		85	85	100%	86	85	94.44
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)**	48.33		40	40	100%	41.67	41.67	86.22
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test; 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia, mikrobiologi, pestisida)	1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test= 60 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia, mikrobiologi, pestisida) = 29		1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test= 30 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia, mikrobiologi, pestisida) = 12	1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test= 30 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia , mikrobiologi, pestisida) = 12	100%	1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test= 60 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia, mikrobiologi, pestisida) = 25	1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test= 30 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia, mikrobiologi, pestisida) = 12	50
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**27**				**URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**persentase peningkatan produksi pertanian** (komoditas palawija dan hortikultura)	4.00		3	3	100%	3.50	3	75
						Jumlah produksi ternak sapi	505		132	132	100%	70	132	26
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah produksi pertanian** (komoditas palawija dan hortikultura)	37,799		31218.27	31218.27	100%	32,311	31218.27	82.59
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang menerima bantuan sarana pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	15 Kelompok		75 KK	75 KK	100%	5 Kelompok	5 Kelompok	33.33
3	27	02	2.01	03	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Kelompok Tani yang dimonitoring penggunaan sarana yang dibantu	6 Kali					2 Kali	2 Kali	33.33
3	**27**	**02**	**2.05**		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	20					15	15	75
3	**27**	**02**	**2.05**	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Sapi yang disalurkan	80 Ekor		50 Ekor	50 Ekor	100%	60 Ekor	50 Ekor	62.5
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)**	292 ton		226 ton	226 ton	100%	233.4 ton	233.4 ton	79.79
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah RPH yang dipelhara**	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah sarana dan prasarana RPH yang diadakan dan dipelihara	23		19	19	100%	18	19	82.6

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani**	10%		10%	10%	100%	10%	10%	100
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan**	100%		60%	60%	100%	70%	60%	60.00
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti diklat/bimtek/magang/demplot	15 PPL		0	0	100%	15 PPL	15 PPL	100
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang dibina/ dikembangkan	20 Poktan		5 Poktan	5 Poktan	100%	20 Poktan	25 Poktan	125
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen penyusunan programa penyuluhan pertanian yang disusun	100 Buku, 20 PPL		0	0	100%	0	0	0
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)**	100		75	75	100%	80	75	75
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)**	100		75	75	100%	80	75	75

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEG/ SUB KEG	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
													Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji di Laboratorium	85		60	60	100%	65	60	70.59
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan**	1350		1,000	1,000	100%	1050	1,000	74.07
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel untuk diagnosa penyakit hewan dan sampel produk asal hewan (PAH) yang diuji di UPTD. Puskeswan	350		250	250	100%	250	250	71.43
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang diperiksa/ divaksinasi / diobati dan dilakukan tindakan (treatment) di UPTD. Puskeswan	1000		750	750	100%	800	750	75.00
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi**	77		15	15	100%	15	15	19.48
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	35 Unit Usaha Produk Asal Hewan		5 Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan (Unit Usaha Produk Asal Hewan)	5 Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan (Unit Usaha Produk Asal Hewan)	100%	30 Unit Usaha Produk Asal Hewan	5 Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan (Unit Usaha Produk Asal Hewan)	14.29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 sedangkan tugas dan fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor : 48 Tahun 2016.

Secara umum kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan dan penyuluh. Dukungan dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terhadap program sangat besar, dan partisipasi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan dibuat melalui proses perencanaan yang terkoordinir dan mengikuti prosedur berdasarkan petunjuk teknis dari Bappelitbang Kota Batam dan petunjuk-petunjuk lainnya.

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

IKU skor PPH merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2021 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2020) dengan aplikasi baru yaitu Harmonisasi Analisis PPH Berdasarkan Data Susenas yang digunakan untuk AKE 2150 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk (berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2021 sebesar 86,9

Berdasarkan Hasil Analisis Pola Pangan Harapan pada Tahun 2021, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Batam yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batam mengalami kenaikan dalam tiga tahun. Pada tahun 2017 (Menggunakan data Susenas 2017) sebesar 86.5, tahun 2018 (Menggunakan data Susenas 2018) sebesar 91.3 dan sasaran tahun 2019 (Menggunakan data Susenas 2018) sebesar 92.1 dan tahun 2020 (Menggunakan data Susenas 2019) sebesar 92.2. Konsumsi Protein Per hari masyarakat Kota Batam tahun 2019 sebesar 69.27 Gram/Kapita dan pada tahun 2020 sebesar 74.74 Gram/Kapita dan pada Tahun 2021 sebesar 73.1 Gram/Kapita. Secara agregat konsumsi protein masyarakat Kota Batam telah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 57 gram/kapita/hari

Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dari tahun 2017 sebesar 2.125,1 kkal/kapita/hari menjadi 2.398,5 kkal/kapita/hari tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.376,1 kkal/kap/hari sedangkan tahun 2020 sebesar 2.433 kkal/kap/hari dan tahun 2021 sebesar 2.211 atau 105.3% AKE. Konsumsi energi ini diatas Angka Kecukupan Energi (AKE) yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 2.150 kkal/kapita/hari.

2. Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi

Indikator Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi adalah salah satu indikator keamanan pangan yang menggambarkan kinerja Dinas dalam melayani masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang aman dan layak dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali. Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam hal ini Bidang Ketahan Pangan khusus nya seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan Pengambilan dan pengujian sampel buah segar di di pasar tradisional dan distributor. Sasaran dalam pelaksanaan pengawasan sayur ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pangan yang akan dikonsumsi khususnya pangan segar harus aman dan bebas dari pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomer : 53/Permentan /KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Uji keamanan pangan dilakukan terhadap komoditas yang diduga mengandung pestisida, formalin dan boraks. Pengambilan sampel hanya dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu pasar Sei Harapan, Tiban Centre dan Aviari. Target sampel yang diuji adalah sebanyak 71 (Tujuh Puluh satu) sampel. Pada tahun 2018, sampel yang diuji sebanyak 71 Tujuh Puluh satu) samp el. sampel mengandung pestisida sebanyak 5 (Lima) buah atau 92.96% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Pada 2019 Target sampel yang diuji adalah sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) sampel. sampel yang diuji sebanyak 56 Tujuh Puluh satu) sampel. Dari 56 Sampel yang di uji laboratorium tidak ditemukan Mengadung Bahan berbahaya dapat dikatakan 100% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Pada 2020 Target sampel yang diuji adalah sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) sampel. sampel yang diuji sebanyak 12 sampel. Dari 12 Sampel yang di uji laboratorium tidak ditemukan Mengadung Bahan berbahaya dapat dikatakan 100% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Untuk tahun 2021 Pengujian sampel dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan parameter yang digunakan yaitu sebagai berikut:

No	Parameter	Testing Method
1.	Residues Of Organocholorine Pesticide	GC (Gas Cromatography)
2.	Residues Of Organophospphate Pesticide	GC (Gas Cromatography)
3.	Residues Of Pyretroid Pesticide	GC (Gas Cromatography)
4.	Residues Of Carbamate Pesticide	LC MS MS (Liquid chromatography-mass spectrometry)
5.	Residues Of Other Pesticide	LC MS MS (Liquid chromatography-mass spectrometry)
6.	Heavy Metal	AAS (Atomic Absorption

		Spectrometer)
7.	Microbial Contaminant (Escherichia coli)	ISO 7251:2005
8.	Microbial Contaminant (Salmonella sp)	ISO 6579 :2002

Pada Tahun 2021, target sampel yang diuji sebanyak 30 sampel dan dilakukan pengujian di Laboratorium PT. Mutu Agung Lestari yang beralamat di Jalan raya Bogor KM 33.5 No. 19 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pengujian yaitu semua sampel dinyatakan negatif baik kandungan pestisida, logam berat maupun mikroba (salmonella sp dan escherichia coli) (dibawah BMR) artinya aman untuk di Konsumsi. Jadi hasil uji 100% aman untuk di konsumsi dari target 100% aman konsumsi.

3. **Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun**)

Salah satu indikator untuk mengetahui ketersediaan pangan utama adalah dengan melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan pangan utama tahun 2021 sebesar 152 (kg/ kapita /orang).

4. **Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura**)

Untuk jumlah produksi Tanaman Palawija yang dimaksud adalah merupakan hasil dari beberapa komoditas pertanian yang meliputi produksi tanaman palawija seperti jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Capaian Produksi Tanaman Palawija tahun 2021 yaitu **20.575** Ton

No	Komoditi	Produksi (Ton) 2017	Produksi (Ton) 2018	Produksi (Ton) 2019	Produksi (Ton) 2020	Produksi (Ton) 2021
1.	Jagung Manis	2.440	2.303	1.897	2062	5,100
2.	Kacang	-	14	22	2	-
3.	Kedelai	93,71	-	-		10
4.	Kacang Tanah		-	11.224		-
5.	Kacang Hijau	8.204,61	11.822	360	16.658,14	13,200
6.	Ubi Kayu Ubi Jalar	278,98	264	-	436.36	2,265
Jumlah		**11.016,59**	**14.403,00**	**13.503**	**19.158,60**	**20.575**

Jumlah produksi Produksi Tanaman Sayur-sayuran yang dimaksud adalah merupakan hasil dari beberapa komoditas pertanian yang meliputi produksi tanaman sayuran seperti Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Terung, Buncis, Ketimun, kangkung, Bayam Parea, Pitula, Sawi, Daun bawang . Capaian produksi hasil pertanian Sayuran tahun 2018 mengalami penurunan yaitu **21.830,20** ton sedangkan jumlah produksi pada tahun 2017 sebesar **30.134,48**. Tahun 2019 dengan produksi 13.662.80 tahun dan 2020 produksi sebesar 18.635,60. Produksi tahun 2021 dengan rincian produksi jenis tanaman sayur-sayuran produksi sebesar 40.493 ada kenaikan dari tahun 2020

No	Komoditi	Produksi (Ton) 2017	Produksi (Ton) 2018	Produksi (Ton) 2019	Produksi (Ton) 2020	Produksi (Ton) 2021
1	Kc. Panjang	4.421,37	349,08	1.741,80	1638.8	4,509
2	Cabe Besar	1.983,39	246,73	1.216.90	1433.45	2,400
3	Cabe Rawit	1.352,90	1.321,50	578	807.9	1,386
4	Terung	1.549,89	1.861,80	964,30	922	4,000
5	Buncis	265,02	14,00		7.00	
6	Ketimun	6.188,07	374,17	1.919,30	1898.80	6,000
7	Kangkung	4.607,81	354,68	2.326.20	2073.70	8,000
8	Bayam	3.822,06	3.220,20	2.378.40	2146.40	8,000
9	Parea	9.27,42	-	-	2422.50	
10	Pitula	1.790,43	-	-		
11	Sawi	3.042,61	1.746,60	2.042,40	1490.6	4,081
12	Daun Bawang	183,51	419,50	490,50	297.7	2,100
13	Bawang Merah			5	12	17
14	Gambas				2307.75	
15	Kecipir				1177.00	
	Jumlah	**30.134,48**	**21.830,20**	**13.662,80**	**18.635,60**	**40.493**

5. Persentase peningkatan produksi ternak sapi

Populasi ternak sapi sebanyak 483 ekor dan ada penambahan sebanyak 6 ekor yang diperuntukan untuk kelompok Sinar Karya di Mongkol, Pemping sehingga berjumlah 495 ekor di TA 2017. dan tahun 2018 berjumlah sebanyak 26 ekor diperuntukan bagi kelompok Karas Mawar Putih 14 ekor (7 KK) dan Kemang Abadi 12 ekor (6 KK) Bulang Kebam. Untuk Tahun 2019 sebanyak 19 Ekor di peruntukan bagi kelompok Sinarkarya II Pemping sebanya 6 kor (3 KK),dan Bulang Lintang dan Bulang Kebam sebanyak 13 Ekor (8 KK).Untuk Tahun 2020 sebanyak 6 Ekor di peruntukan bagi kelompok Mekar Sari II Bulang Lintang (5 KK). Untuk Tahun 2021 sebanyak 122 ekor. di peruntukan bagi Kelompok Putra Jaya Sukses Pemping sebanyak 18 ekor (9 KK), Karya Sepaka 1 dan Karya Sepakat 2 Pecung masing-masing 10 dan 12 ekor (5 dan 6 KK), Kinun Sejahtera dan Kinun Jaya Subang Mas masing-masing (30 dan 32 ekor 15 dan 16 KK). Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis pelaksanaan sosialisasi budidaya peternakan “ indikator kinerja “ di Triwulan I (satu) target kinerja TA. 2021, 807 ekor dari target yang ada di Renstra OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam belum dilaksanakan persiapan Administrasi, Namun pelaksanaan di Triwulan II

sesuai dengan RUP pengadaan Sapi melalui Penunjukan Lelang pada ULP-LPSE Setdako Batam Center.

1. Masalah dan Solusi

   1. Populasi pertahun tidak sesuai dengan yang dialokasikan, sehingga populasi kelompok belum semua diakomodir sesuai ketentuan teknis dan CPCL kegiatan. Progress dan sinergitas dalam menumbuh kembangkan kelompok masih belum optimal sehingga diharapkan ada kelompok petani peternak yang handal dan mandiri setiap tahunnya dan ada Penilaian kelompok untuk melihat kinerja dan peningkatan Status belum ada sentuhan dan Pembinaan Kelembagaan dan report dari PPL sesuai dengan WKPP binaan.
   2. Belum optimal di berdayakan kelompok peternak oleh petugas dan bidang dalam hal SPIP (system pengendalian Internal Pemerintah) sehingga belum ada kejelasan status dari hasil pembinaan bagi kelompok ternak yang ada (pemula, handal, tangguh dan mandiri) yang dinilai setiap tahunnya.

- <u>Populasi Ternak Sapi</u>

  Populasi = Jumlah ternak yang dipelihara oleh petani peternak dihitung berdasarkan sensus tahunan (Sp) 10 kali.

  Peningkatan Populasi

  = Jumlah Ternak yang Dipelihara Peternak + Penampungan (instansi) + Pemasukan + Kelahiran - Kematian + Pemotongan + Mutasi ternak / luar Batam.

- Target Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kota Batam Target Kinerja pada Tahun 2021 populasi sebanyak 807 ekor untuk lebih jelasnya dapat dirinci sesuai rumus diatas, sebagaimana data populasi ternak sapi (ekor) / tri wulan sebagai berikut
- Triwulan I (pertama)

Jumlah ternak dipelihara masyarakat 283 ekor, penampungan (instalasi) 524 ekor dan dikurang ternak mati 1 ekor dan yang di potong 177 ekor, peternak pelaku usaha yang memasukkan ternak untuk persiapan qurban untuk digemukan (Fattening).

- Triwulan II (dua)

  Jumlah ternak dipelihara masyarakat 283 ekor, dipenampungan (instalasi) 524 ekor dan dikurang ternak mati 7 ekor dan yang potong 225 ekor, total peningkatan Populasiternak 829 ekor.

- Triwulan III (tiga)

  Jumlah ternak dipelihara masyarakat 395 ekor, ternak masuk 1.745 ekor baik yang di temiang dan diluar temiang setiap Kecamatan dan penampungan (instalasi) 550 ekor, total peningkatan Populasi ternak 2.690 ekor.

- Triwulan IV (empat)

  Jumlah ternak dipelihara masyarakat 395 ekor, dipenampungan (instalasi) 585 ekor (sisa Qurban, total peningkatan Populasiternak 980 ekor.

6. Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal

Indicator ini sangat penting untuk meningkatkan taraf kesehatan dan perluasan akses layanan, yaitu berupa jumlah kasus penyakit zoonosis. Penyakit Zoonosis adalah penyakit dan infeksi yang dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Penyakit Zoonosis disebabkan oleh pathogen seperti Bakteri, Virus, Fungi serta Parasit. Di Indonesia terdapat 15 jenis Penyakit Zoonosis Prioritas di Indonesia meliputi : Avian Influenza, Anthraks, Fasciolasis, Rabies, Brucellosis, Leptospirosis, Japanese B. Encephalitis, Bovine Tuberculosis, Salmonellosis, Schistosomiasis, Q-Fever, Champylobacteriosis, Trichinellosis,

Paratuberculosis, Toksoplasmosis dan Cysticercosis/Taeniasis. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dimana salah satu tujuan kegiatan yaitu menurunnya kasus penyakit zoonosis berupa Menurunnya jumlah kasus positif Avian Influenza di Lokasi Peternakan Ayam Komersial dan Pasar Unggas di Kota Batam. Tindakan strategis yang di Lakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam selaku Instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan meliputi Surveilans dan monitoring penyakit hewan (keswan) dan Prosuk Asal Hewan (Kesmavet), Terlaksananya KIE/Sosialisasi penyakit menular zoonosis, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk asal hewan, pengobatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan, deteksi dini penyakit hewan dan respon cepat terhadap adanya kejadian penyakit hewan di Kota Batam.

Monev Target Kinerja Kasi Keswan dan Kesmavet

- Asumsi target populasi ayam komersial (Peternakan Ayam Buras, Ayam Broiler dan Ayam Layer) = 100.000 ekor
- Prevalensi kejadian penyakit 2%
- Sampling Size = 2% x 100.000 = 2000
- Kejadian penyakit pertahun = 2% x 100.000 ekor = 2000 ekor populasi ayam

1. Target Tahun 2016 = 40 Kasus/2000 x 100% = 2%
2. Target Tahun 2017 =36 Kasus/2000 x 100% = 1,8 %
3. Target Tahun 2018 =32 Kasus/2000 x 100% = 1.6 %
4. Target Tahun 2019 =28 Kasus/2000 x 100% = 1.4 %

5. Target Tahun 2020 = 24 Kasus/2000 x 100% = 1,2 %

6. Target Tahun 2021 = 20 Kasus/2000 x 100% = 1 %

Tiap Tahun Terjadi Penurunan Kasus Kejadian Kematian Unggas karena Penyakit Unggas Menular Avian Influenza dan New Castle Disease sebanyak 4 Kasus Kematian Unggas pada jumlah populasi unggas dalam satu kandang/flok sebanyak 2000 ekor.

- Jenis sampel yang diambil adalah serum darah, swab kloaka dan swab lingkungan di Peternakan Ayam Buras, Broiler dan Layer.
- Target penurunan kasus penyakit hewan menular tiap tahun adalah dengan cara pengendalian penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan penyakit New Castle Disease (ND) pada unggas/ayam di Kota Batam.
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan kasus kejadian penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan New Castle Disease (ND) adalah berupa Surveilans dan Monitoring Penyakit hewan berupa Pengambilan Sampel dan Pengujian Sampel di Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terakreditasi yaitu Balai Veteriner Bukittinggi untuk Menguji tingkat titer Antibodi/tingkat kekebalan Unggas terhadap penyakit Avian Influenza dan New Castle Disease serta Mendeteksi Adanya Transmisi Virus AI/Avian Influenza di Kandang/Flok.
- Tiap Tahun dilaksanakan Surveilans sebanyak 4 Kali Baik yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Keswan Provinsi Kepri maupun Balai Veteriner Bukittinggi.
- Saran dan anjuran ke peternakan adalah untuk menurunkan jumlah kasus penyakit di peternakan unggas adalah dengan mengawasi allu lintas unggas, memperbaiki biosekuriti, desinfeksi, manajemen dan sanitasi kandang, dan vaksinasi yang baik dan tepat (coverage vaksinasi 99%).
- Untuk Tahun 2021 kasus kejadian penyakit pada unggas pada flok dengan jumlah populasi ayam 2000 ekor adalah 20 Kasus kejadian mortalitas/kematian unggas.
- Tiap Tahun dapat ditekan kematian unggas sebanyak 4 kasus.

Diharapkan di tahun mendatang pelaksanaan surveilans dan monitoring penyakit hewan baik pada unggas maupun hewan/ternak lainnya lebih sering dilaksanakan sehingga traceback atau penelusurun kembali penyakit hewan akan semakin cepat dan baik (deteksi dini).

Hitungan target Kinerja jumlah unit Usaha Usaha Produk Asal Hewan yang bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

1. Tahun 2017 terealisasi 21 Unit Usaha PAH yang sudah bersertifikat NKV dengan Persentase 73,3%
2. Tahun 2018 terealisasi 27 Unit Usaha PAH bersertifikat NKV dengan Persentase 27/21 x 73,3% = 0,9%
   Total =73,3%+0,9% = 74,2%
3. Tahun 2019 terealisasi 30 Unit Usaha PAH bersertifikat NKV dengan Persentase 30/27 x 74,2% = 0,82%
   Total =74,2%+0,82% = 75,02%

4. Tahun 2020 teralisasi 44 NKV Usaha PAH bersertifikat NKV dengan Persentase 44/30 x 75,02% = 1,1 %
   Total = 75,02% + 1,1% =76,12%
5. Tahun 2021 terealisasi 46 NKV Usaha PAH bersertifikat NKV dengan peresentase 46/44 x 76,12% = 0,79 %
   Total = 76,12% + 0,79 % = 76,91 %

Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah unit usaha produk asal hewan yang memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kota Batam.

Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Siskeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner lainnya yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Oleh karena itu, Puskeswan dapat dianggap sebagai salah satu institusi strategis dalam upaya percepatan proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan. Akan tetapi, sejatinya hingga saat ini eksistensi dan peran Puskeswan boleh dikatakan masih belum optimal.

Pembangunan UPTD. Puskeswan sebagai sentral kegiatan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan dan reproduksi hewan mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Puskeswan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus di lapangan sehingga diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali.

Peran Puskeswan meliputi pelayanan terkait dengan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, konsultasi veteriner dan penyuluhan bidang kesehatan hewan, dan surat kesehatan dokter hewan. Sementara itu fungsi Puskeswan mencakup kegiatan (pelaksanaan, pemberian, dan pelayanan) penyehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologis, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, dan jasa veteriner.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPTD. Puskeswan Pemerintah Kota Batam pada TA. 2021 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 jo. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terhitung sejak tanggal 2 November 2020 pelayanan penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Rekomendasi Pengeluaran Produk Asal Hewan (PAH) dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP.

2. Sesuai dengan SOP dan SPP tentang penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan/ atau PAH, sebelumnya harus dilaksanakan pemeriksaan hewan dan/ atau sampel PAH yang akan dilalulintaskan / dikeluarkan dari Kota Batam yang dilaksanakan di Puskeswan Pemko Batam dengan mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) atau Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH) sebagai bukti pemeriksaan hewan dan / atau PAH.

3. Untuk menunjang kegiatannya, setiap Puskeswan harus dilengkapi dengan sarana dan peralatan menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

64/Permentan/OT.140/9/2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan minimal sarana dan peralatan pada setiap Puskeswan terdiri dari:

a. sarana bangunan fisik, sarana penunjang, peralatan dan kelengkapan kantor, sarana transportasi, obat-obatan, vitamin, vaksin, pestisida, dan materi sejenis lainnya;
b. pakaian kerja petugas;
c. peralatan-peralatan medis veteriner seperti peralatan klinik/diagnostik dan peralatan bedah;
d. peralatan dan bahan laboratorium;
e. peralatan pengumpul spesimen;
f. peralatan reproduksi dan kebidanan;
g. peralatan produksi; dan
h. peralatan khusus peternakan.

4. Mulai tanggal **11 Januari 2021** sudah dilaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan **Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan**. Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan hewan dilakukan secara **Non Tunai** (dapat menggunakan kartu BRIZZI, Mesin EDC, Kartu Debit BRI atau Bank Lainnya) dan langsung masuk ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Batam.

5. Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan di UPTD. Puskeswan Pemerintah Kota Batam dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

a. **Pelayanan Pasif** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Puskeswan.
b. **Pelayanan semi aktif** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.

c. **Pelayanan aktif** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.

6. Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan yang dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan dilaksanakan di UPTD. Puskeswan Pemerintah Kota Batam antara lain :

   a. Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Sampel PAH dalam rangka mobilisasi dalam kota dan ke luar Kota Batam serta penerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) atau Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH).

   b. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan yang dapat dilaksanakan UPTD. Puskeswan saat ini antara lain :

      1) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan hewan dan ternak
      2) Pengobatan hewan kesayangan dan ternak;
      3) Vaksinasi hewan kesayangan (anjing dan kucing);
      4) Bedah ringan hewan kesayangan;
      5) Kunjungan ke Peternakan atau Lokasi.

7. Jumlah Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Laboratorium /Puskeswan) Tahun 2021 sebesar Rp. 233.183.021,- (116,59 %) dari target Rp. 200.000.000,-. Data Pelaporan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Laboratorium / Puskeswan) Tahun 2021 terlampir.

8. Jumlah Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) / Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH) yang diterbitkan dari UPTD. Puskeswan Tahun 2021 sebanyak 1470 berkas. Data Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) / Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH) dari UPTD. Puskeswan Tahun 2021 terlampir.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	12		13
1	Score Pola Pangan Harapan (PPH)			86.9	87.2	87.6	87.9	88.2	88.5	86.9	87.2	87.6	87.9	
2	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi			85	86	87	88	89	90	100.0	86	87	88	
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)			152	152	152	153	153	153	152	152	152	153	
4	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)			3.0	3.5	4	4	4	4	3.0	3.5	4	4	
5	Persentase peningkatan produksi ternak sapi			8	16	21	18	22	20	8	16	21	18	
6	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal			75	80	85	90	95	100	75	80	85	90	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi di Indonesia juga terjadi di Kota Batam, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu-isu strategis tersebut antara lain laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, legalitas lahan pertanian, regulasi/kelembagaan, terbatasnya infrastuktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras. Tidak sebandingnya hasil produksi pertanian dan peternakan dengan jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan peningkatkan hasil pertanian dan peternakan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada (Intensifikasi Pertanian) dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memeperluas lahan pertanian dan peternakan yang sebelumnya di manfaatkan sebagai lahan pertanian (Ekstensifikasi Pertanian).

Untuk melakukan intensifikasi pertanian dan peternakan perlu dilakukan penguatan kelompok petani dan peternak yang dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian melalui pembinaan dan sosialisasi tentang teknologi budidaya pertanian dan peternakan, serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian dan peternakan. Ekstensifikasi Pertanian perlu melakukan pemusatan kawasan lahan pertanian dan peternakan terpadu.

Adapun permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketahanan Pangan

- Program ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan baik.
- Belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang menghambat akses fisik dan memicu kenaikan harga.
- Ketersediaan Pangan , antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
- Sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien,

- Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi.
- hasil produksi pangan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk
- Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.

2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

- Kurangnya SDM Penyuluh lapangan untuk pertanian dan peternakan
- Terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan,
- Keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani
- Rendahnya pengetahuan/ pemahaman petani dan peternak tentang budidaya tanaman
- Lambatnya dalam pendistribusian pupuk ke lokasi sentra produksi.

3. Bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- Ketidakpastian status lahan yang dikelola terutama di kawasan Bonded Area.
- Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih belum optimal.
- Status lahan yang belum jelas untuk pengembangan budidaya pertanian / peternakan sangat berpengaruh terhadap penataan usaha pertanian / peternakan.

- Belum maksimalnya pelayanan dan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH).
- Belum maksimalnya pengawasan Pertanian dan Peternakan
- Masih Kurangnya SDM petugas Pertanian dan Peternakan.
- Masih kurangnya pemanfaatan pulau-pulau / wilayah pesisir Kota Batam sebagai diversifikasi usaha peternakan.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar/Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). WNPG VIII tahun 2004 dan IX tahun 2008 menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari dan 52 gram /kapita/hari. AKG tersebut mengalami penyesuaian dalam WNPG X tahun 2012, dan telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 sebesar 2.150 kilokalori/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari untuk protein.

Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan pencapaian skor PPH 100. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009) dijadikan target capaian tahun 2015. Capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2021 yaitu 86,9 atau 92,35% dari target yang ditetapkan yaitu 94.1

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2021 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2020) dengan aplikasi baru yaitu Harmonisasi Analisis PPH Berdasarkan Data Susenas yang digunakan untuk AKE 2150 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk (berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2020 sebesar 86,9

Kondisi aktual di Kota Batam tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan di Kota Batam dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor.

2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan bahkan dalam era reformasi diharpakan untuk berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Secara intern sebagian terbesar petani Indonesia masih petani subsistem dengan segala keterbatasan mereka, khusunya dalam bidang penguasaan teknologi pertanian yang modern. Secara ektern sektor pertanian Indonesia kurang mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangannya secara menyeluruh apabila dibandingkan dengan perhatian pemerintah kepada sektor industri.

Dalam era baru pertanian, penyuluh lapangan harus dituntut untuk memiliki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi *(teknology transfer)*, fasilitasi *(facilitation)* dan penasehat *(advisory work*). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan juga harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kelembagaan penyuluh pertanian mempunyai peranan strategis dalam membangun pertanian khususnya dalam mengembangkan kopentensi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Melalui peran penyuluh diharapkan masyarakat pertanian sebagai pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengoranisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi dan

Sumber daya yang dimiliki…

sumber daya yang dimiliki sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan. Sehingga dapat terwujudnya sistem pelatihan pertanian yang kredibel yang berbasis sistem managemen mutu sesuai kebutuhan petani sehingga memiliki daya saing tinggi.

3. Bidang Pertanian

Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama penunjang kebutuhan Pangan Nasional. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi masyarakat, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen produk hortikultura yang dihasilkan petani, merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan kebutuhan yang semakin meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan.

Komoditas hortikultura juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar luar negeri (ekspor). Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan dan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat petani skala kecil, menengah dan besar dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi dan jenisnya

yang beragam. Produk hortikultura dalam negeri saat ini telah mampu memasok kebutuhan konsumen dalam negeri melalui pasar tradisional dan pasar modern serta pasar luar negeri. Ketersediaan sumberdaya hayati yang berupa jenis tanaman dan varietas yang banyak dan ketersediaan sumberdaya lahan, apabila dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Kondisi ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pembangunan subsektor hortikultura.

Untuk mencapai apa yang telah diprogramkan perlu adanya langkah –langkah:

- Melakukan penguatan modal usaha pertanian.
- Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis.
- Meningkatkan sarana produksi Pertanian
- Melakukan pengawasan hasil produk pertanian
- Meningkatkan perluasan areal usaha tani
- Meningkatkan kualitas hasil pertanian

i. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam upaya mengurangi kesenjangan antara kemampuan produksi lokal Kota Batam dengan kebutuhan pangan asal ternak sesuai norma gizi, maka diharapkan adanya peningkatan produksi, terutama untuk daging sapi dan telur untuk mengimbangi angka kebutuhan konsumsi daging dan telur yang meningkat seiring dengan pertambahan penduduk Kota Batam.

Untuk meningkatkan produksi ternak harus juga didukung oleh peningkatan sarana prasarana produksinya maupun sarana prasarana pelayanan yang mendukung terhadap peningkatan produksi.

Disamping itu secara fisik, pangan asal hewan harus memenuhi kriteria layak dan aman untuk dikonsumsi, namun secara mikrobiologis pun harus terjamin keamanannya, yaitu melalui pendekatan indikator kandungan mikroba maksimal dan ada tidaknya residu antibiotik pada bahan pangan tersebut.

Pelaku usaha pengolahan hasil peternakan diharapkan dapat difasilitasi baik sarana prasarana produksinya, pemasarannya maupun pembinaan teknisnya, sehingga kualitas dan kuantitas produk olahan meningkat. Diharapkan juga adanya penambahan jenis produk olahan peternakan andalan yang secara signifikan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan pendapatan peternak.

Untuk mendukung kelancaran tata niaga ternak perlu didukung oleh tersedianya sarana pasar produksi ternak (pasar ternak) yang memadai.

Tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) yang representatif 1 (unit) pada tahun 2012 untuk menunjang keamanan pangan asal ternak yang memenuhi azas Aman, Utuh, Sehat dan Halal (ASUH) dan pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) di sekitar pasar-pasar tradisional (pasar basah) di Kota Batam.

Pada tahun 2023 diharapkan terjadi peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi peternakan harus didukung dengan kegiatan masing-masing seksi sebagai berikut :

1. Pembibitan dan Produksi Ternak, dengan kegiatan :

1) Pembibitan dan perawatan ternak
2) Pengembangan usaha peternakan
3) Penanganan dan pengamanan ternak bantuan pemerintah
4) Pengembangan kemitraan usaha peternakan
5) Pembangunan sarana prasarana pembibitan ternak dan HMT
6) Penyelamatan sapi betina produktif

7) Optimalisasi Inseminasi Buatan.

8) Pembangunan sarana penampungan dan pengolahan Biogas.

2. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :

1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan hewan peliharaan

2) Pengembangan dan peningkatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

3) Peningkatan pelayanan Puskeswan

4) Pembangunan Rumah Potong Hewan

5) Pembangunan Rumah Potong Unggas

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dengan kegiatan:

1) Pengembangan produk olahan asal ternak

2) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pasar peternakan

3) Pengadaan pasar ternak

4) Pembangunan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan

5) Peningkatan sarana prasarana kios daging dipasar tradisional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan awal RKPD Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Beberapa temuan hasil reviu antara Rencangan Awal RKPD dengan analisa kebutuhan Renja 2023 diantaranya adalah :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan efisiensi anggaran untuk bisa dimaksimalkan anggaran ke program dinas yang menjadi prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian karena tidak adanya usulan dari masyarakat untuk pengadaan bantuan sarana dan prasarana pertanian dan begitu juga pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan kegiatan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dilakukan efisiensi pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner efisiensi pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Batam

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12,945,964,790**	**2**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11,646,156,094**
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**12,945,964,790**	**2.09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**11,646,156,094**
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	**100%**	**11,121,645,958**	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	**100%**	**9,765,691,544**
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	Kota Batam	**100%**	**8,612,088,564**	**2.09.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	Kota Batam	**100%**	**7,198,566,894**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	40 Orang/ Bulan	8,606,233,860	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	41 Orang/ Bulan	7,167,186,894
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	5,854,704	2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	31,380,000
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum**	Kota Batam	**100%**	**247,925,580**	**2.09.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Batam	**100%**	**291,697,250**
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	8,553,454	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6,210,000
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	103,652,122	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	82,638,750
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	19,945,818	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	11,212,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3,723,840	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3,600,000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	44 Laporan	112,050,346	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	1 Laporan	188,036,000
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kota Batam	**100%**	**274,638,372**	**2.09.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kota Batam	**100%**	**156,440,000**
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	15 Unit	274,638,372	2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	10 Unit	156,440,000
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	**1,641,327,994**	**2.09.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	**1,765,537,400**
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	223,579,354	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	258,965,000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	1,417,748,640	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	1,506,572,400
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	**345,665,448**	**2.09.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	**353,450,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	3 Unit	108,591,312	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	3 Unit	120,930,000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	21,515,520	2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	24,450,000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	215,558,616	2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	208,070,000
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)**	Kota Batam	**2607**	**1,507,883,976**	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)**	Kota Batam	**2607**	**1,578,799,000**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)**	Kota Batam	**152.4**	**246,353,563**	**2.09.03.2.01**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)**	Kota Batam	**152.4**	**235,872,750**
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Batam	1 Laporan	177,079,826	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Batam	1 Dokumen	171,323,500
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	18 Laporan	69,273,737	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	2 Laporan	64,549,250
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)**	Kota Batam	30	**361,530,413**	**2.09.03.2.02**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)**	Kota Batam	30	**361,529,250**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	30 Ton	361,530,413	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	30 Ton	361,529,250
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)**	Kota Batam	**12 kecamatan**	**900,000,000**	**2.09.03.2.04**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)**	Kota Batam	**12 kecamatan**	**981,397,000**
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	900,000,000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	981,397,000
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**59.38**	**223,840,478**	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**59.38**	**211,475,394**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun**	Kota Batam	**100**	**103,492,144**	**2.09.04.2.01**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun**	Kota Batam	**100**	**103,492,144**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kota Batam	1 Dokumen	103,492,144	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kota Batam	1 Dokumen	103,492,144
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**7.81**	**120,348,334**	**2.09.04.2.02**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**7.81**	**107,983,250**
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	14 Laporan	45,042,545	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	32,799,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	75,305,789	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	75,184,250
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**87**	**92,594,378**	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**87**	**90,169,500**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**43.33**	**92,594,378**	**2.09.05.2.01**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**43.33**	**90,169,500**
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	22 Sertifikat	92,594,378	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	60 Sertifikat	90,169,500
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		Kota Batam		**8,344,383,500**	**3**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		Kota Batam		**3,692,844,000**
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		Kota Batam		**8,344,383,500**	**3.27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		Kota Batam		**3,692,844,000**
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi**	Kota Batam	**4 % dan 85 Ekor**	**5,210,565,355**	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi**	Kota Batam	**4 % dan 85 Ekor**	**1,178,631,500**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)**	Kota Batam	**33,603**	**2,394,565,355**	**3.27.02.2.01**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)**	Kota Batam	**33,603**	**600,712,000**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	3 Laporan	92,597,005	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	3 Laporan	0
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	2,301,968,350	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	600,712,000
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam**	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	15	**2,816,000,000**	**3.27.02.2.05**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam**	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	15	**577,919,500**
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kota Batam	15 Ton	2,816,000,000	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kota Batam	3 Ton	577,919,500
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)**	Kota Batam	**256 ton**	**1,285,000,000**	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)**	Kota Batam	**256 ton**	**906,287,150**
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah RPH yang dipelhara**	Kota Batam	**2 Unit**	**1,285,000,000**	**3.27.03.2.02**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah RPH yang dipelhara**	Kota Batam	**2 Unit**	**906,287,150**
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Batam	2 Unit	1,285,000,000	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Batam	2 Unit	906,287,150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)**	Kota Batam	**85**	**1,123,818,145**	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)**	Kota Batam	**85**	**978,998,850**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)**	Kota Batam	**85**	**115,667,125**	**3.27.04.2.01**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)**	Kota Batam	**85**	**115,629,800**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Batam	1 Laporan	115,667,125	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Batam	1 Laporan	115,629,800
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan**	Kota Batam	1125	**950,000,000**	**3.27.04.2.03**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan**	Kota Batam	1125	**803,671,950**
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Batam	12 Laporan	500,000,000	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Batam	12 Laporan	450,310,050
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Batam	12 Laporan	450,000,000	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Batam	12 Laporan	353,361,900
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi**	Kota Batam	31	**58,151,020**	**3.27.04.2.04**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi**	Kota Batam	31	**59,697,100**
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Batam	1 Laporan	58,151,020	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Batam	35 Unit	59,697,100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani**	Kota Batam	10%	**725,000,000**	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani**	Kota Batam	10%	**628,926,500**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan**	Kota Batam	75%	**725,000,000**	**3.27.07.2.01**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan**	Kota Batam	75%	**628,926,500**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	1 Unit	275,000,000	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	1 Unit	217,520,000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	20 Unit	450,000,000	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	12 Unit	411,406,500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk usualan permintaan dari masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terdapat usulan dari kelurahan Bulang Lintang berupa Pengadaan Hijauan Pakan Ternak (IPT) 2 Ha, Bibit Rumput (Odot Tambah Sektaria) 4000 Batang, Alat Pengolahan Kotoran Hewan Ternak Menjadi Compos 4 Unit, Pengadaan Cultivator 2 Unit alat Penunjang (IPT), dan Pupuk Urea 800 Kg dan Pupuk TSP 800 Kg pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sedangkan dari Pulau Buluh permintaaan Bantuan Bibit Durian dan Rambutan sebanyak 500 Batang pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian namun usulan dari Pulau Buluh dan Bulang Lintang tidak termasuk dalam prioritas Kecamatan.. Adapun usulan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Batam

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME		CATATAN
1	2	3	4	5		6
1	Nihil					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020- 2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera.

Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu.

Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KET
1	2	3	4
	Visi: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Misi: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka **tujuan pembangunan pertanian periode**	**Kementrian Pertanian**	

	2020-2024 yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah : a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja : 1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja : 2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional 3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja : 4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional 5. persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja : 6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang		

	sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja : 8. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan 9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan f. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja : 10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani 11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja : 13. persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja : 15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :		

	16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian		
2	**Visi Badan Ketahanan Pangan** Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2020-2024, yaitu: ***"Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan"*** **Misi Badan Ketahanan Pangan Badan** Ketahanan Pangan harus berperan sebagai "*Lead Institution*" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2020-2024, sebagai berikut: 1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; 2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan; 3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; 4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu **Tujuan Badan Ketahanan Pangan** Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara sebagai berikut : 1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;	**Badan Ketahanan Pangan**	

	2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; 3. Memperkuat sistem distribusi pangan; 4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; 5. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.		

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026. Bunyi Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah "Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya". Untuk mewujudkan Visi tersebut, diambillah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian
2. Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian
3. Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
5. Peningkatan penerapan penyuluhan pertanian
6. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan
8. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi
9. Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan
10. Peningkatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota
11. Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi

12. Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
13. Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi
14. Penanganan daerah rawan pangan
15. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
16. Peningkatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi
17. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
18. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program – program di lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Mengacu Pada Kebijakan Nasional dan Provinsi.

a. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan.

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan
2. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Program Urusan Pangan dan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)		PDRB Sektor Pertanian		Miliar Rupiah	2.173	2.177	2.181	2.186	2.191	2.196
		Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan tahun berjalan dikurangi jumlah produktivitas tahun lalu dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu kali 100%	%	1,29	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah Produktivitas hortikultura tahun berjalan dikurangi jumlah produktivitas tahun lalu dibagi jumlah	%	0,52	0,74	0,77	0,80	0,94	1,03

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				produktivitas tahun yang lalu kali 100%							
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Produktivitas perkebunan tahun berjalan dikurangi jumlah produktivitas tahun lalu dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu kali 100%	%	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8
			Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Penambahan Populasi dibagi jumlah populasi kali 100	%	1,10	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).	%	99,84	99,88	99,91	99,95	99,98	99,99
2.	Meningkatkan ketahanan pangan daerah		Skor PPH Konsumsi	Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + ...+ skor PPH kelompok lain-lain.	skor	86,4	86,90	87,70	88,50	89,30	90,10
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan	Persentase angka kecukupan	Persentase angka kecukupan tingkat energi dibagi angka	%	111	113	114	115	116	117

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
		yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	energi tingkat ketersediaan	kecukupan tingkat konsumsi x 100							
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Standar deviasi komoditas beras nilai rata-rata harga beras kali 100	%	≤10	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11
			Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rentan terhadap kerawanan pangan di bagi jumlah kecamatan se-Kepri di kali 100	%	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
			Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Sample produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sample yang diambil kali 100	%	80	81	82	83	84	85
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	skor	BB	BB	BB	BB	BB	BB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan										
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	skor	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan dinas. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut: **Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam.**

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terjaganya Keanekaragaman, Kertersediaan dan Keamanan Pangan
2. Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan
3. Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.

Tabel. 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.9	87.2	87.6	87.9	88.2	88.5
		Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	85	86	87	88	89	90
			Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	152	152.2	152.4	152.6	152.8	153
		Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3.0	3.5	4	4	4	4
			Persentase peningkatan produksi ternak sapi	8	16	21	18	22	20
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	75	80	85	90	95	100

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2023, Adapun Rumusan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11,646,156,094**				**11,646,156,094**
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**11,646,156,094**				**11,646,156,094**
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	**100%**	**9,765,691,544**	APBD		**100%**	**9,765,691,544**
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	Kota Batam	**100%**	**7,198,566,894**	APBD		**100%**	**8,612,088,564**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	41 Orang/ Bulan	7,167,186,894	APBD		41 Orang/ Bulan	8,606,233,860
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	31,380,000	APBD		12 Dokumen	5,854,704
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Batam	**100%**	**291,697,250**	APBD		**100%**	**315,054,076**
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6,210,000	APBD		1 Paket	8,553,454
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	82,638,750	APBD		5 Paket	103,652,122
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	11,212,500	APBD		1 Paket	11,212,500
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3,600,000	APBD		2 Dokumen	3,600,000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Batam	1 Laporan	188,036,000	APBD		1 Laporan	188,036,000
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kota Batam	**100%**	**156,440,000**	APBD		**100%**	**156,440,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	10 Unit	156,440,000	APBD		10 Unit	156,440,000
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	**1,765,537,400**	APBD		100%	**1,765,537,400**
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	258,965,000	APBD		1 Laporan	258,965,000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	1,506,572,400	APBD		1 Laporan	1,506,572,400
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	**353,450,000**	APBD		100%	**353,450,000**
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	3 Unit	120,930,000	APBD		3 Unit	120,930,000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	24,450,000	APBD		20 Unit	24,450,000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	208,070,000	APBD		2 Unit	208,070,000
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)**	Kota Batam	**2607**	**1,578,799,000**	APBD		**2607**	**1,578,799,000**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)**	Kota Batam	**152.4**	**235,872,750**	APBD		**152.4**	**235,872,750**
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Batam	1 Laporan	171,323,500	APBD		1 Laporan	171,323,500
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	2 Laporan	64,549,250	APBD		2 Laporan	64,549,250
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)**	Kota Batam	30	**361,529,250**	APBD		30	**361,529,250**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	30 Ton	361,529,250	APBD		30 Ton	361,529,250
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)**	Kota Batam	**12 kecamatan**	**981,397,000**	APBD		**12 kecamatan**	**981,397,000**
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	981,397,000	APBD		1 Laporan	981,397,000
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**59.38**	**211,475,394**	APBD		**59.38**	**211,475,394**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun**	Kota Batam	**100**	**103,492,144**	APBD		**100**	**103,492,144**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kota Batam	1 Dokumen	103,492,144	APBD		1 Dokumen	103,492,144
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**7.81**	**107,983,250**	APBD		**7.81**	**107,983,250**
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	32,799,000	APBD		2 Laporan	32,799,000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	75,184,250	APBD		1 Dokumen	75,184,250
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**87**	**90,169,500**	APBD		**87**	**90,169,500**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**43.33**	**90,169,500**	APBD		**43.33**	**90,169,500**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	60 Sertifikat	90,169,500	APBD		60 Sertifikat	90,169,500
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		Kota Batam		**3,692,844,000**	APBD			**3,692,844,000**
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		Kota Batam		**3,692,844,000**	APBD			**3,692,844,000**
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi**	Kota Batam	**4 % dan 85 Ekor**	**1,178,631,500**	APBD		**4 % dan 85 Ekor**	**1,178,631,500**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)**	Kota Batam	**33,603**	**600,712,000**	APBD		**33,603**	**600,712,000**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	3 Laporan	0	APBD		3 Laporan	0
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	600,712,000	APBD		1 Laporan	600,712,000
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	15	**577,919,500**	APBD		15	**577,919,500**
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kota Batam	3 Ton	577,919,500	APBD		3 Ton	577,919,500
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)**	Kota Batam	**256 ton**	**906,287,150**	APBD		**256 ton**	**906,287,150**
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana**	**Jumlah RPH yang dipelhara**	Kota Batam	**2 Unit**	**906,287,150**	APBD		**2 Unit**	**906,287,150**
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Kota Batam	2 Unit	906,287,150	APBD		2 Unit	906,287,150
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)**	Kota Batam	**85**	**978,998,850**	APBD		**85**	**978,998,850**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)**	Kota Batam	**85**	**115,629,800**	APBD		**85**	**115,629,800**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Batam	1 Laporan	115,629,800	APBD		1 Laporan	115,629,800
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan**	Kota Batam	1125	**803,671,950**	APBD		1125	**803,671,950**
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Batam	12 Laporan	450,310,050	APBD		12 Laporan	450,310,050
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Batam	12 Laporan	353,361,900	APBD		12 Laporan	353,361,900
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi**	Kota Batam	31	**59,697,100**	APBD		31	**59,697,100**
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Batam	35 Unit	59,697,100	APBD		35 Unit	59,697,100
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani**	Kota Batam	10%	**628,926,500**	APBD		10%	**628,926,500**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan**	Kota Batam	75%	**628,926,500**	APBD		75%	**628,926,500**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	1 Unit	217,520,000	APBD		1 Unit	217,520,000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	12 Unit	411,406,500	APBD		12 Unit	411,406,500

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana Kerja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan rencana kerja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, Indikator, pagu indikatif, sumber pendanaan sebagaimana terlampir.

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kota Batam

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11,646,156,094**		
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**11,646,156,094**		
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	**100%**	**9,765,691,544**	APBD	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	Kota Batam	**100%**	**7,198,566,894**	APBD	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	41 Orang/ Bulan	7,167,186,894	APBD	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]			41 Orang/ Bulan	5,150,329,513		
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	31,380,000	APBD	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa			12 Dokumen	50,640,000		
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Batam	**100%**	**291,697,250**	APBD	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6,210,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Lampu LED 15-20 Watt dan Lampu LED 40 Watt			40 Buah	5,200,000		
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	82,638,750	APBD	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Paket	17,643,750		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			1 Paket	21,650,000		
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	11,212,500	APBD	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Paket	11,212,500		
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	3,600,000	APBD	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			24 Dokumen	3,600,000		
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	1 Laporan	188,036,000	APBD	
	Perjalanan Dinas Eselon III Luar Daerah			1 Laporan	27,923,000		
	Perjalanan dinas Esselon II Luar daerah			1 Laporan	40,448,000		
	Perjlaan dinas Luar daerah Eselon IV			1 Laporan	34,316,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Laporan	17,810,000		
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kota Batam	**100%**	**156,440,000**	APBD	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	10 Unit	156,440,000	APBD	
	Belanja Modal Perabot Kantor			10 Unit	12,150,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			2 Unit	17,000,000		
	Belanja Modal Kursi Staf			47 Buah	49,720,000		
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			5 Unit	20,500,000		
	Belanja Modal Personal Computer			4 Unit	57,070,000		
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	**1,765,537,400**	APBD	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	258,965,000	APBD	
	Tagihan Listrik			1 Laporan	168,960,000		
	Belanja Penambahan Daya			1 Laporan	36,005,000		
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Laporan	1,506,572,400	APBD	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			1 Laporan	1,333,150,000		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			1 Laporan	69,300,000		
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	**353,450,000**	APBD	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	3 Unit	120,930,000	APBD	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			3 Unit	104,980,000		
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	20 Unit	24,450,000	APBD	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-alat kantor Lainnya			1 unit	4,950,000		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			20 unit	12,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	PEMELIHARAAN KOMPUTER - KOMPUTER UNIT-PERSONAL COMPUTER			10 unit	7,300,000		
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	208,070,000	APBD	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung			2 Unit	208,070,000		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)**	Kota Batam	**2607**	**1,578,799,000**	APBD	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)**	Kota Batam	**152.4**	**235,872,750**	APBD	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Batam	1 Laporan	171,323,500	APBD	
	Jasa Tenaga Ahli Neraca Bahan Makanan			9 Orang / Bulan	85,500,000		
	Akomodasi (Hotel), Transportasi Udara, & Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Laporan	70,745,000		
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Batam	2 Laporan	64,549,250	APBD	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			2 Laporan	31,542,000		
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)**	Kota Batam	30	**361,529,250**	APBD	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	30 Ton	361,529,250	APBD	
	Beras Medium			30 Ton	361,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)**	Kota Batam	**12 kecamatan**	**981,397,000**	APBD	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Batam	1 Laporan	981,397,000	APBD	
	Bantuan Barang Kepada Masyarakat Kegiatan P2L			(64 Kel)	579,584,000		
	Lomba Demo Masak dan LCM B2SA			12 kecamatan	401,813,000		
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**59.38**	**211,475,394**	APBD	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun**	Kota Batam	**100**	**103,492,144**	APBD	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kota Batam	1 Dokumen	103,492,144	APBD	
	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Peta FSVA			2 Orang x 3 Bulan	57,000,000		
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)**	Kota Batam	**7.81**	**107,983,250**	APBD	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	32,799,000	APBD	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah & Perjalanan Dinas Luar Daerah			2 Laporan	30,852,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	75,184,250	APBD	
	Perjalanan Dinas & Verifikasi dan Distribusi Beras CPPD			1 Dokumen	72,484,000		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**87**	**90,169,500**	APBD	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)**	Kota Batam	**43.33**	**90,169,500**	APBD	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	60 Sertifikat	90,169,500	APBD	
	Jasa Pengujian Uji Keamanan Pangan			60 Sertifikat	50,295,000		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		Kota Batam		**3,692,844,000**	APBD	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		Kota Batam		**3,692,844,000**	APBD	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan Jumlah produksi ternak sapi**	Kota Batam	**4 % dan 85 Ekor**	**1,178,631,500**	APBD	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)**	Kota Batam	**33,603**	**600,712,000**	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Batam	3 Laporan	0	APBD	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Batam	1 Laporan	600,712,000	APBD	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			1 Laporan	597,800,000		
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Kota Batam	15	**577,919,500**	APBD	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kota Batam	3 Ton	577,919,500	APBD	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			3 Ton	447,358,000		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)**	Kota Batam	**256 ton**	**906,287,150**	APBD	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah RPH yang dipelhara**	Kota Batam	**2 Unit**	**906,287,150**	APBD	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Kota Batam	2 Unit	906,287,150	APBD	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor			1 Unit	154,700,000		
	IPAL Rumah Potong Hewan			1 Unit	197,417,500		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)**	Kota Batam	**85**	**978,998,850**	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)**	Kota Batam	**85**	**115,629,800**	APBD	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Batam	1 Laporan	115,629,800	APBD	
	Biaya Pengujian Sampel Keswan dan Produk Asal Hewan di Laboratorium Balai Veteriner			1 Laporan	65,600,000		
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan**	Kota Batam	1125	**803,671,950**	APBD	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Batam	12 Laporan	450,310,050	APBD	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			1 Paket	176,931,650		
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum lainnya			6 Unit	273,378,400		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Batam	12 Laporan	353,361,900	APBD	
	Belanja Obat-Obatan-Obat			1 Paket	175,116,000		
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi**	Kota Batam	31	**59,697,100**	APBD	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Batam	35 Unit	59,697,100	APBD	
	Sewa Hotel untuk Sosialisasi			50 Orang / Kegiatan	17,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani**	Kota Batam	10%	**628,926,500**	APBD	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan**	Kota Batam	75%	**628,926,500**	APBD	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	1 Unit	217,520,000	APBD	
	Peningkatan kompetensi/Pelatihan Penyuluh Pertanian			5 Orang	75,000,000		
	Peningkatan kompetensi/Pelatihan Penyuluh Pertanian			1 Paket	70,606,000		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	12 Unit	411,406,500	APBD	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			1 Laporan	328,333,000		

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang akan tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023, setiap unit terkait (Sekretariat dan Bidang) wajib menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi maupun pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik antar program, antara kegiatan dalam satu program, maupun kegiatan antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing unit kerja. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kabupaten.

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Pertanian. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja dalam lingkup Dinas, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program - program yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Renja Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas untuk menyusun kebijakan publik, baik yang berupa regulasi maupun pelayanan publik, dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun 2023, dengan ketentuan :

   a. Uraian penggunaan pagu indikatif Tahun 2023 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas agenda kerja pembangunan daerah.

b. Uraian rencana penggunaan pagu indikatif Tahun 2023 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas SKPD sesuai tupoksinya.

3. Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 ini wajib mengikuti prinsip - prinsip pengarusutamaan yaitu : pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender;
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat luas dan stakeholder lainnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan program - program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program - program pembangunan.

5.1. Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun 2023, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaninan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran ayng ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA, RKA SKPD, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaninan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Walikota sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, Juli 2022

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Batam

Mardanis. S.E M.H
NIP. 19680714 198011 1 003

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penalaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Batam, Juli 2022

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BATAM

MARDANIS, SE, MH
NIP. 19680714 198811 1 003

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Raja Haji No. 03 Telp. (0778) 323429 Fax. (0778) 327794
Email : dinas_KP2_KotaBatam@yahoo.com
SEKUPANG - BATAM
Kode Pos : 24922

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 82/SET/DKPP/11/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 3 (Tiga) tahun;

b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 26 November 2023

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

MARDANIS. S.E. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
Nomor : KPTS.82/DKPP/11/2021
Tanggal : 26 November 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM TAHUN 2023

JABATAN	JABATAN DALAM TIM
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	PENGARAH
SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
KASUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	SEKRETARIS
PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERTANIAN	
JABATAN	**JABATAN DALAM TIM**
Kabid Pertanian	Koordinator
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian	Anggota
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengawasan Pupuk dan Petisida	Anggota

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG KETAHANAN PANGAN	
JABATAN	**JABATAN DALAM TIM**
Kabid Ketahanan Pangan	Koordinator
Kepala Seksi Bidang Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
Kepala Seksi Ketersedian dan Kerawanan Pangan	Anggota

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
JABATAN	**JABATAN DALAM TIM**
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak	Anggota
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine	Anggota
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Anggota

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN	
JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Kabid Kelembagaan dan Penyuluh	Koordinator
Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh	Anggota
Kepala Seksi Penguatan SDM Petani dan Peternak	Anggota
Kepala Seksi Programa Penyuluhan	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 26 November 2021

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

MARDANIS, S.E. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003